

EVALUASI STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SITUBONDO

Shara Pramesta Al Jose ¹⁾, Eny Haryati ²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: shararendraalJose1@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam kategori Kota Prioritas Lokasi Intervensi Stunting. Berdasarkan Hasil Survei Studi Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi Kabupaten Situbondo tahun 2022 yaitu sebesar 30,9%. Adanya otonomi daerah memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan untuk diterapkan di wilayahnya. Kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Konvergensi Program Stunting. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penurunan stunting di Kabupaten Situbondo dengan mengambil dan menarik kesimpulan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan pedoman wawancara kepada tiga pejabat instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait program stunting di Kabupaten Situbondo. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan review dokumen. Teori yang digunakan mengacu pada teori evaluasi Fred R. David yang mencakup tiga aktivitas evaluasi strategi mendasar yaitu pengkajian ulang, pengukuran kinerja, dan pengendalian strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Kabupaten Situbondo sudah mampu menurunkan angka stunting walaupun adanya perbedaan data SSGI dengan data pada bulan timbang. Data bulan timbang menunjukkan bahwa prevalensi stunting Kabupaten Situbondo sudah jauh dibawah target nasional sebesar 7,08% pada tahun 2022.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Strategi Percepatan, Stunting

Abstract

Situbondo Regency is one of the regencies included in the category of Priority Cities for Stunting Intervention Locations. Based on the results of the Indonesian Nutrition Study Survey (SSGI), the prevalence of Situbondo Regency in 2022 was 30.9%. The existence of regional autonomy authorizes regions to regulate and implement various policies to be implemented in their regions. The policy to reduce stunting in Situbondo Regency refers to Regent Regulation Number 45 of 2022 concerning Acceleration of Stunting Reduction and Convergence of Stunting Programs. The purpose of the study was to evaluate the strategies carried out by the local government in accelerating stunting reduction in Situbondo Regency. The research method is qualitative research. This research focuses on stunting reduction in Situbondo Regency by taking and drawing conclusions from data sourced from primary data and secondary data. Primary data was obtained using interview guidelines to three Situbondo Regency Government agency officials related to the stunting program in Situbondo Regency. Meanwhile, secondary data was collected by reviewing documents. The theory used refers to Fred R. David's evaluation theory which includes three fundamental strategy evaluation activities, namely review, performance measurement, and strategy control. The results showed that the strategies implemented by Situbondo Regency have been able to reduce the stunting rate despite the difference between the SSGI data and the data at the weighing month. The weighing month data shows that Situbondo District's stunting prevalence is far below the national target of 7.08% by 2022.

Keywords: Policy Evaluation, Acceleration Strategy, Stunting

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia merupakan aspek utama dalam perkembangan suatu negara. Untuk mencetak SDM yang cerdas, terampil, berkarakter dan berbudi pekerti luhur, tentunya harus didahului oleh SDM yang kuat dan sehat. Namun masalah kelaparan dan kekurangan gizi masih dihadapi oleh seluruh negara di dunia hingga saat ini.

Salah satu masalah kekurangan gizi global yang serius yaitu stunting. Saat ini diperkirakan telah terjadi pada lebih dari 160 juta anak usia balita di seluruh dunia mengalami stunting. Kasus stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan stunting sebagai salah satu program prioritas. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Di Provinsi Jawa Timur ada beberapa kabupaten atau kota yang prevalensinya meningkat salah satunya yaitu Kabupaten Situbondo, dari angka 23,7% di 2021 meningkat menjadi 30,9% di tahun 2022. Sebagai langkah penanggulangan stunting, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana strategi dan implementasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana evaluasi strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi dari

implementasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Definisi Stunting

Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan istilah *stunted* (pendek) dan *severely stunted* (sangat pendek). Balita pendek adalah balita dengan status gizi berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umur bila dibandingkan dengan standar baku WHO, nilai Z-scorenya kurang dari -2 SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai Zscorenya kurang dari -3 SD (Kemenkes, RI 2016).

2. Diagnosis dan Klasifikasi Stunting

Stunting didefinisikan sebagai kondisi balita memiliki tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi ($<- 2SD$) dari standar median WHO. Bayi yang dilahirkan memiliki panjang badan lahir normal bila panjang badan lahir bayi tersebut berada pada panjang 48-52 cm (Kemenkes R.I, 2010). Panjang badan lahir pendek dipengaruhi oleh pemenuhan nutrisi bayi tersebut saat masih dalam kandungan. Penentuan asupan yang baik sangat penting untuk mengejar panjang badan yang seharusnya. Berat badan lahir, panjang badan lahir, umur kehamilan dan pola asuh

merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian stunting. Panjang badan lahir merupakan salah satu faktor risiko kejadian stunting pada balita (Anugraheni, 2012).

Stunting akan mulai nampak ketika bayi berusia dua tahun (TNP2K, 2017). Penilaian status gizi balita yang sering dilakukan adalah dengan cara penilaian antropometri. Secara umum antropometri berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang dinyatakan dengan standar deviasi unit Z (Z-score) dimana hasil pengukuran antropometri menunjukkan Z-score kurang dari -2SD sampai dengan -3SD (pendek atau *stunted*) dan kurang dari -3SD (sangat pendek atau *severely stunted*) (Kemenkes RI, 2018).

Stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah ditimbang berat badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada dibawah normal. Jadi secara fisik balita akan lebih pendek dibandingkan balita seumurnya. Penghitungan ini menggunakan standar Z score dari WHO. Normal, pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan *severely stunted* (sangat pendek).

3. Faktor-Faktor Penyebab Stunting

a) Berat Badan Lahir Rendah

Bayi yang lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Bayi dengan berat badan lahir rendah akan mengalami hambatan pada

pertumbuhan dan perkembangannya serta kemungkinan terjadi kemunduran fungsi intelektualnya selain itu bayi lebih rentan terkena infeksi dan terjadi hipotermi (Direktorat Bina Kesehatan Ibu, 2012).

Bayi yang berat lahirnya kurang dari 2.500 gram akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan anak, termasuk dapat berisiko menjadi pendek jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tiwari yang menyatakan bahwa anak dengan riwayat kelahiran BBLR berisiko menderita stunting dibandingkan dengan anak yang tidak menderita BBLR (Tiwari, 2014).

Berat badan lahir sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang anak balita, pada penelitian yang dilakukan oleh (Lidia, 2018) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara berat lahir dengan kejadian stunting pada balita di Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh (Sartono, 2013) di Yogyakarta tentang hubungan antara BBLR dengan kejadian stunting diantaranya menyatakan hal yang sama bahwa ada hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian stunting (Sartono, 2013).

b) ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI yang diberikan sejak bayi dilahirkan hingga usia bayi enam bulan tanpa memberikan makanan atau minuman lainnya seperti susu formula, air putih, air jeruk kecuali vitamin dan obat (Kemenkes RI, 2016). Bayi atau balita dalam praktek pemberian ASI eksklusif maupun MPASI yang kurang optimal dan terbatasnya makanan dalam hal kualitas, kuantitas dan jenis akan memberikan kontribusi terhadap stunting (WHO, 2012).

Pada bayi, Air Susu Ibu (ASI) sangat berperan dalam pemenuhan nutrisinya. Konsumsi ASI juga meningkatkan kekebalan tubuh bayi

sehingga menurunkan risiko penyakit infeksi. Kadar mineral pada ASI tidak dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi ibu dan status nutrisi ibu. Mineral dalam ASI lebih mudah diserap dibanding mineral dalam susu sapi. Mineral utama yang terdapat pada ASI adalah kalsium yang berfungsi untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka, transmisi jaringan saraf dan pembekuan darah. Hal inilah yang mendukung pertumbuhan bayi terutama tinggi badan sehingga bayi yang diberikan ASI juga memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kurva pertumbuhan dibandingkan dengan bayi yang diberikan dengan susu formula. Dengan pemberian ASI, bayi dapat terhindar dari resiko stunting (Rivanaica, 2016).

Menyusui yang berkelanjutan selama dua tahun memberikan kontribusi signifikan terhadap asupan nutrisi penting pada bayi (Sandra Fikawati dkk, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri di Sleman terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita dua sampai tiga tahun. ASI merupakan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Bayi yang tidak mendapatkan ASI dengan cukup berarti memiliki asupan gizi yang kurang baik dan dapat menyebabkan kekurangan gizi salah satunya dapat menyebabkan stunting (Sri Indrawati, 2016).

Penelitian yang dilakukan Arifin pada tahun 2012 dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kejadian stunting dipengaruhi oleh berat badan saat lahir, asupan gizi balita, pemberian ASI, riwayat penyakit infeksi, pengetahuan gizi ibu, balita, pendapatan keluarga, jarak antar kelahiran namun faktor yang paling dominan adalah pemberian ASI (Arifin, 2012).

c) Tinggi Badan Ibu

Karakteristik ibu atau keadaan ibu yang meliputi tinggi badan merupakan faktor genetika yang menyebabkan stunting. Orangtua yang memiliki tinggi badan yang pendek kemungkinan besar akan menurunkan sifat pendek tersebut terhadap anaknya. Hal ini dikarenakan adanya kondisi patologis yaitu defisiensi hormon pertumbuhan yang dimiliki oleh gen pembawa kromosom tersebut, apabila tidak didukung dengan asupan yang adekuat untuk menyokong pertumbuhan, pada generasi berikutnya akan berdampak terhadap kegagalan pertumbuhan atau stunted (Kukuh & Nuryanto, 2013).

Menurut (Kemenkes RI, 2010) anak yang lahir dari ibu dengan tinggi badan kurang dari 150 cm cenderung melahirkan bayi pendek lebih banyak (42,2%) dibandingkan kelompok ibu dengan tinggi badan normal (36%). Menurut penelitian yang dilakukan di Ghana dengan sampel anak berusia dibawah lima tahun menunjukkan bahwa anak yang memiliki ibu dengan tinggi badan kurang dari 150 cm berisiko menderita stunting (Ali, dkk, 2017). Menurut (Narsikhah, 2012) salah satu atau kedua orang tua yang pendek akibat kondisi patologi (seperti defisiensi hormon pertumbuhan) memiliki gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek sehingga memperbesar peluang anak mewarisi gen tersebut dan tumbuh menjadi stunting.

d) Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar (SD, MI, SMP, dan MTs), pendidikan menengah pertama (SMA, MA, SMK), dan pendidikan tinggi (diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor). Pemerintah di Indonesia mewajibkan belajar sembilan tahun untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga masyarakat di Indonesia harus menempuh pendidikan minimal sembilan tahun dihitung mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masyarakat yang sudah menempuh pendidikan minimal sembilan tahun tersebut dianggap sudah mempunyai kualitas yang layak untuk menjalankan kehidupannya. Menurut (Astuti, 2017) ibu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang luas dan mudahnya menangkap informasi baik dari pendidikan formal yang mereka tempuh maupun dari media massa (cetak dan elektronik) untuk menjaga kesehatan anak dalam mencapai status gizi yang baik sehingga perkembangan anaknya menjadi lebih optimal.

Semakin tinggi pendidikan ibu maka pengetahuannya akan gizi akan lebih baik, sebaliknya semakin rendah pendidikan ibu maka pengetahuan akan gizi akan kurang baik. Rendahnya pendidikan ibu pada saat kehamilan mempengaruhi pengetahuan gizi ibu saat mengandung. Ibu hamil yang mengalami kurang gizi akan mengakibatkan janin yang dikandung juga mengalami kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada kehamilan yang terjadi terus menerus akan melahirkan anak mengalami kurang gizi. Kondisi ini jika berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama akan menyebabkan anak mengalami kegagalan dalam pertumbuhan (stunting) (Ni'mah d& Muniroh, 2016).

Menurut (Delmi Sulastri, 2012) pendidikan ibu yang rendah dapat mempengaruhi pola asuh dan perawatan anak. Selain itu juga berpengaruh dalam pemilihan dan cara penyajian makanan yang akan dikonsumsi oleh anaknya. Penyediaan bahan dan menu makan yang tepat untuk balita dalam upaya peningkatan status gizi akan dapat

terwujud bila ibu mempunyai tingkat pengetahuan gizi yang baik.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Haile yang menyatakan bahwa anak yang terlahir dari orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih mudah dalam menerima edukasi kesehatan selama kehamilan, misalnya dalam pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi saat hamil dan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan (Haile, 2016).

e) Status Ekonomi

Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kejadian stunting, karena keadaan sosial ekonomi atau keadaan rumah tangga yang tergolong rendah akan mempengaruhi tingkat pendidikan rendah, kualitas sanitasi dan air minum yang rendah, daya beli yang rendah serta layanan kesehatan yang terbatas, semuanya dapat berkontribusi terkena penyakit dan rendahnya asupan zat gizi sehingga berpeluang untuk terjadinya stunting (Lainua, 2016).

Tingkat pendapatan keluarga memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stunting. Hal ini dikarenakan keluarga dengan pendapatan yang rendah akan mempengaruhi dalam menyediakan pangan untuk keluarga. Daya beli keluarga tergantung dengan pendapatan keluarga, dengan adanya pendapatan yang tinggi maka kemungkinan terpenuhinya kebutuhan makan bagi keluarga (Adriani, 2012).

Salah satu penelitian di Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang dilakukan oleh (Eko Machmud, 2018) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang memiliki hubungan bermakna dengan kejadian stunting pada balita. Menurut (Khoirun dkk, 2015) status ekonomi keluarga yang rendah akan mempengaruhi pemilihan makanan yang

dikonsumsinya sehingga biasanya menjadi kurang bervariasi dan sedikit jumlahnya terutama pada bahan pangan yang berfungsi untuk pertumbuhan anak seperti sumber protein, vitamin, dan mineral, sehingga meningkatkan risiko kurang gizi. Menurut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 340/KEP/2020 tentang penetapan upah minimum kabupaten atau kota tahun 2021, bahwa UMK Kulon Progo Rp.1.805.000,00.

4. Dampak Stunting

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Kemenkes RI, 2016).

Masalah gizi, khususnya anak pendek, menghambat perkembangan anak muda, dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Studi menunjukkan bahwa anak pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang menurun dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa. Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan

kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang (UNICEF, 2012).

Stunting memiliki konsekuensi ekonomi yang penting untuk laki-laki dan perempuan di tingkat individu, rumah tangga dan masyarakat. Bukti yang menunjukkan hubungan antara perawakan orang dewasa yang lebih pendek dan hasil pasar tenaga kerja seperti penghasilan yang lebih rendah dan produktivitas yang lebih buruk (Hoddinott et al, 2013). Anak-anak stunting memiliki gangguan perkembangan perilaku di awal kehidupan, cenderung untuk mencapai nilai yang lebih rendah, dan memiliki kemampuan kognitif yang lebih buruk daripada anak-anak yang normal (Hoddinott et al, 2013).

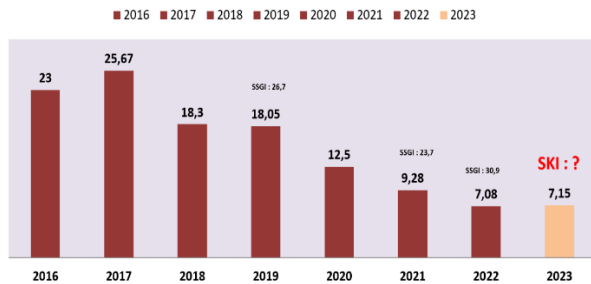
C. METODE

Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Desain penelitian yaitu deskriptif observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, sedangkan informan utama yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini, data diolah dengan cara reduksi dan disajikan secara deskripsi. Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data, terakhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Grafik yang bersumber dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa target prevalensi stunting di tahun 2022 sebesar 18,4% ada 17 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang angka prevalensi stuntingnya berada di bawah target namun Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang angka Prevalensinya jauh dibawah target yaitu sebesar

30,9%. Namun terdapat perbedaan data yang bersumber dari SSGI dengan data bulan timbang di Kabupaten Situbondo, dimana data Kabupaten Situbondo menunjukkan angka prevalensi stunting di bawah target nasional yaitu berada di angka 7,08% di tahun 2022.



Gambar 4.1. Tren Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2023 Berdasarkan Bulan Timbang Februari
Sumber: SSGI Kabupaten Situbondo (2023)

Grafik di atas menunjukkan angka prevalensi stunting berdasarkan bulan timbang Februari mengalami kenaikan pada tahun 2017 mencapai 25,67% namun pada tahun 2018-2022 terus mengalami penurunan yang cukup baik hingga 7,08% di tahun 2022.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan terkait perbedaan data dari SSGI dengan data Bulan Timbang, menyebutkan bahwa jika data SSGI bersumber dari hasil survei yang dilakukan oleh tenaga ahli di pemerintah pusat sedangkan data bulan timbang merupakan data yang diambil dari kader posyandu masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Situbondo.

“... Data stunting itu ada dua, ada namanya data bulan timbang, data bulan timbang ini agustus ya, februari dan agustus, data bulan timbang ini mirip sensus jadi di situ ada by name by address anaknya sudah dihitung semua, jadi lebih arahnya ke sensus, tapi ada juga SSGI survei status gizi, namanya survei jadi tidak dihitung semua akhirnya yang namanya survei ya pakai sampling”.

Strategi pendekatan yang digunakan Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting menggunakan tiga strategi pendekatan yang berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan stunting secara signifikan. Tiga strategi pendekatan tersebut meliputi kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat serta gerakan seribu hari pertama kehidupan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dalam upaya percepatan penurunan stunting melaksanakan intervensi spesifik yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, kegiatan tersebut diantaranya adalah:

1. Pemeriksaan kesehatan remaja di sekolah.
2. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil di RS dan Puskesmas.
3. Pemeriksaan kesehatan ibu bersalin di fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah.
4. Pemeriksaan kesehatan bayi di fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah.
5. Pemeriksaan kesehatan balita di posyandu, fasilitas kesehatan, dan kunjungan rumah.
6. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas.
7. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil kontak minimal 6 kali selama kehamilan (K4).
8. Promosi inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif.
9. Pemberian vitamin A untuk ibu nifas.
10. Pemberian vitamin A untuk balita 6-59 bulan.
11. Pelayanan imunisasi dasar lengkap.
12. Pemberian zinc pada balita diare.
13. Pembinaan pencegahan stunting melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting.
14. Peningkatan surveilans gizi dalam penemuan kasus gangguan kesehatan dan memberikan layanan kesehatan.
15. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).
16. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kekurangan gizi.

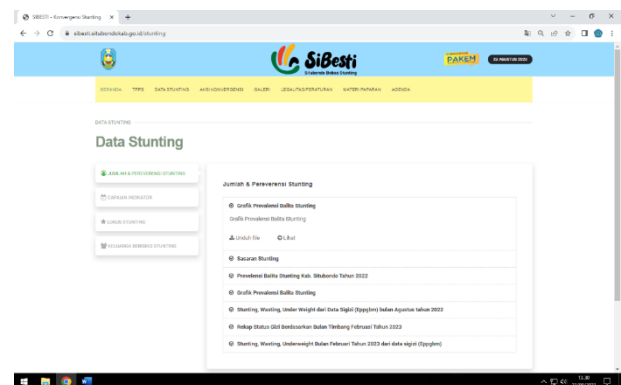
17. Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil.
18. Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri.
19. Layanan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
20. Layanan pengendalian penyakit kecacingan pada balita.
21. Promosi penggunaan jamban sehat.
22. Promosi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya percepatan penurunan stunting melaksanakan intervensi sensitif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pencatatan KB pasca salin, pencatatan KB semua metode pencatatan KB dengan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di tingkat desa yang bertujuan Edukasi 1000 HPK dan pengasuhan Tumbuh Kembang balita.

Selaku *leading sector* perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten, Bappeda bertugas menyusun perencanaan daerah yang kemudian disinkronkan dengan dokumen perencanaan tematik dalam hal ini rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo yang kemudian menjadi lampiran dari Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Melalui dokumen perencanaan dimaksud, Bappeda maupun perangkat daerah teknis lainnya memiliki pedoman dalam menyusun pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang serta dalam menentukan prioritas kegiatan, sasaran maupun lokus kegiatan.

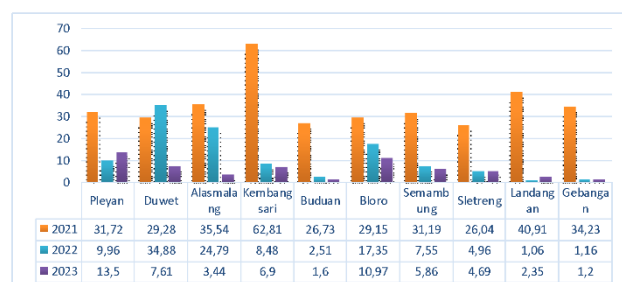
Di samping itu, pada 8 aksi konvergensi, Bappeda bertanggung jawab pada aksi ke-1 yaitu Analisa Situasi, aksi ke-2 mengenai Penyusunan Rencana Kerja serta aksi ke-6 tentang Manajemen Data dan aksi ke-8 yaitu Review Kinerja. Terkait hasil analisa situasi yang telah dilakukan, untuk tahun 2023 telah dihasilkan calon lokus percepatan penurunan stunting dan akan dibawa kedalam forum rembuk stunting.

Sedangkan pada aksi ke-2, mengenai Penyusunan Rencana Kerja telah dipetakan rencana kegiatan dari perangkat daerah pada tahun 2022 maupun rencana tahun 2023 untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo. Sebagai media untuk penyediaan data, informasi serta knowledge management, Bappeda bersama perangkat daerah terkait menyediakan website yang dapat memberikan informasi mengenai data stunting, informasi kegiatan serta informasi lain yang berkenaan dengan implementasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo dengan alamat website <http://sibesti.situbondokab.go.id>.



Gambar 4.2. Data Stunting di Laman SiBesti
Sumber: Website SiBesti (2023)

Berdasarkan data tahun 2021, terdapat 10 desa yang menjadi lokus stunting di tahun 2022. Perbandingan prevalensi stunting tahun 2021-2022 dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Gambar 4.3. Prevalensi Stunting di Desa Lokus Stunting tahun 2021-2022
Berdasarkan Bulan Timbang Februari
Sumber: SSGI Kabupaten Situbondo (2023)

Dari grafik diatas berdasarkan bulan timbang Februari 2021 sampai dengan Februari 2022 setelah adanya peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penurunan stunting di 10 Desa Lokus Stunting tahun 2022 terdapat 9 desa mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun ada 1 desa yang prevalensinya naik yaitu Desa Duwet. Namun hal ini menunjukkan bahwa kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo sudah sangat baik. Sedangkan di tahun 2023 ada dua Desa yang mengalami kenaikan yaitu Desa Pleyan dan desa Landangan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Desa yang sudah di tentukan lokus dan mendapatkan intervensi sensitif dan spesifik belum dapat menjamin bahwa di tahun berikutnya akan terus mengalami penurunan dan menjadi lokus kembali di tahun selanjutnya.

Dalam hasil evaluasi strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo peneliti mengacu kepada teori Fred R David (2007) bahwa aktivitas evaluasi strategi yaitu dengan tiga langkah dengan mengkaji faktor-eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan faktor internal mencakup kelemahan dan kekuatan yaitu data dikumpulkan *by name by address*, Regulasi kebijakan pemerintah dana stunting, ketidaksinkronan data dengan pusat, kurangnya edukasi stunting dan kualitas SDM kurang optimal.

Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman seperti komitmen kepala daerah, pemberdayaan masyarakat atau kader, panduan konvergensi di daerah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak stunting, pergantian pejabat atau penanggungjawab program dan budaya/mitos di masyarakat. Setelah mengkaji faktor internal dan eksternal lalu melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan melihat hasil capaian target stunting apakah mengalami peningkatan atau penurunan, di Kabupaten Situbondo angka stunting mengalami penurunan prevalensi di bawah target nasional sebesar 7,08% di tahun 2022. Yang terakhir melakukan pengendalian strategi yaitu adanya inovasi-inovasi yang muncul untuk menangani

stunting seperti Mas Genteng (Lima Aksi Gerakan Pencegahan dan Atasi Stunting), penilaian kinerja TPPS Kecamatan dan desa, serta Web SiBesti.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan aspek evaluasi, strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo dirasa sudah efektif dan efisien dalam menurunkan angka stunting. Jika melihat hasil data dari bulan timbang diketahui bahwa angka prevalensi stunting sudah turun jauh dibawah target nasional diharapkan komitmen yang sudah ada ini dapat dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini belum menjangkau semua OPD-OPD terkait karena keterbatasan waktu penelitian serta penelitian ini belum menjangkau implementasi tingkat desa yang mungkin masih banyak kendala-kendala di tingkat desa dalam percepatan penurunan stunting.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi diantaranya:

- a) Pemahaman masyarakat mengenai stunting lebih ditingkatkan, karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami stunting itu seperti apa agar masyarakat terutama di desa lebih memiliki pemahaman lebih luas lagi tentang dampak buruk stunting.
- b) Gencarkan pelatihan untuk seluruh kader desa dalam pengukuran balita, agar para kader posyandu tidak salah dalam mengukur balita yang berdampak pada data stunting yang dihasilkan.
- c) Dukungan dari kecamatan dan kepala desa harus lebih ditingkatkan, karena masalah stunting bukan hanya ada pada pemerintah daerah saja tetapi harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.

REFERENSI

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2022). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- Badan Pusat Statistik, & Sekretariat Wakil Presiden RI. (2021). *Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2019-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2021). *Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022*. Jakarta: Bappenas (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).
- Bhutta, Z. A., Akseer, N., Keats, E. C., Vaivada, T., Baker, S., Horton, S. E., et al. (2020). How Countries Can Reduce Child Stunting At Scale: Lessons From Exemplar Countries. *The American Journal Of Clinical Nutrition*, 112, 894–904.
- David, F. R. (2005). *Manajemen Strategi Konsep (Tenth Edition)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. Jakarta: Publikasi Data.